



Manajemen Berbasis Sekolah sebagai Instrumen Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pendidikan

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Rahmattullah Universitas Bina Bangsa Getsempena rahmattullah@bbg.ac.id	ISSN: 2776-5148 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 http://almufi.com/index.php/AJP
Roza Yuliana Universitas Bina Bangsa Getsempena Roza211@sma.belajar.id	
Hiswa Fatila Universitas Bina Bangsa Getsempena Hiswafatila236@gmail.com	
Nova Diliza Universitas Bina Bangsa Getsempena ledynovadiliza@gmail.com	
Dhifa Latifah Universitas Bina Bangsa Getsempena dhifalathifah@gmail.com	
Indah Turahma Universitas Bina Bangsa Getsempena indahturahma@gmail.com	

© 2025 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Rahmattullah., Yuliana, R., Fatila, H., Diliza, N., Latifah, D., & Turahma, I. (2025). Peran Kepemimpinan Transformasional dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Almufi Jurnal Pendidikan*, 5 (3),89-94.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pendidikan di SD Negeri 72 Banda Aceh serta keterkaitannya dengan SDGs 16 dan Asta Cita 7. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi tidak langsung, dan dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini adalah seorang guru yang terlibat langsung dalam pelaksanaan MBS di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan MBS dilakukan melalui perencanaan bersama, pengelolaan dana secara terbuka, serta pelibatan guru, komite sekolah, dan orang tua dalam pengambilan keputusan. Praktik transparansi seperti publikasi laporan keuangan dan rapat terbuka terbukti memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sekolah, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman dan kemampuan administrasi. Secara keseluruhan, penerapan MBS berkontribusi positif dalam mewujudkan tata kelola sekolah yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan serta kebijakan nasional.

Kata Kunci: Manajemen Berbasis Sekolah, Transparansi, Akuntabilitas, Tata Kelola Pendidikan, SDGs 16, Asta Cita

Abstract

This study aims to analyze the implementation of School-Based Management (SBM) in improving transparency and accountability of educational governance at SD Negeri 72 Banda Aceh and its relationship to SDGs 16 and Asta Cita 7. The study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews, indirect observation, and documentation. The main informant in this study is a teacher who is directly involved in the implementation of SBM at the school. The results show that the implementation of SBM is carried out through joint planning, open fund management, and the involvement of teachers, school committees, and parents in decision-making. Transparency practices such as the publication of financial reports and open meetings have been proven to strengthen accountability and increase public trust in schools, although there are still obstacles such as limited understanding and administrative capabilities. Overall, the implementation of SBM contributes positively to realizing school governance that is transparent, accountable, and aligned with sustainable development goals and national policies.

Key Words: Keywords: School-Based Management, Transparency, Accountability, Education Governance, SDGs 16, Asta Cita 7

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional yang berperan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran, tetapi juga oleh tata kelola satuan pendidikan yang efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia, pemerintah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai pendekatan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya, menyusun program, serta mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan sekolah. Melalui otonomi tersebut diharapkan sekolah mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan secara efektif dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi (Mulyasa, 2022; Nurkolis, 2017).

MBS merupakan model pengelolaan pendidikan yang menempatkan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan program dan sumber daya sekolah. Dalam perspektif good governance, transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan, sedangkan akuntabilitas menuntut setiap kebijakan, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan program sekolah dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, implementasi MBS tidak hanya dipandang sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen penguatan tata kelola sekolah yang demokratis dan berorientasi pada pelayanan publik.

Meskipun kebijakan MBS telah diterapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, implementasinya di berbagai daerah masih menunjukkan beragam capaian. Sejumlah penelitian melaporkan bahwa pelaksanaan MBS mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kepemimpinan sekolah, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan program pendidikan. Namun, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya berjalan optimal. Keterlibatan komite sekolah dalam proses pengambilan keputusan masih bersifat formalitas di sebagian sekolah, sementara keterbukaan informasi mengenai perencanaan program, pengelolaan anggaran, dan pelaporan kegiatan belum dilaksanakan secara konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan MBS tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan sekolah, budaya organisasi, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (Sagala, 2013; Mulyasa, 2022).

Penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola sekolah juga memiliki relevansi yang kuat dengan agenda pembangunan global. Sustainable Development Goals (SDGs) menempatkan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan sebagai salah satu target penting dalam Tujuan 16 (Peace, Justice and Strong Institutions). Meskipun SDGs

Tujuan 4 berfokus pada penyediaan pendidikan yang berkualitas, pencapaiannya tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola institusi pendidikan sebagai penyelenggara layanan publik. Dengan demikian, implementasi MBS yang mampu mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam mendukung terciptanya institusi pendidikan yang berintegritas serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks nasional, penguatan tata kelola sektor publik juga menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah melalui agenda Asta Cita, khususnya pada aspek reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan akuntabilitas, dan penguatan partisipasi publik. Arah kebijakan tersebut memberikan penegasan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik peserta didik, tetapi juga pada penyelenggaraan pendidikan yang dikelola secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, implementasi MBS memiliki posisi strategis sebagai instrumen operasional dalam mewujudkan tata kelola sekolah yang selaras dengan prinsip-prinsip good governance dan kebijakan pembangunan nasional.

Berbagai penelitian mengenai MBS umumnya masih berfokus pada pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pendidikan, efektivitas kepemimpinan kepala sekolah, atau peningkatan prestasi belajar peserta didik. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi MBS sebagai instrumen penguatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola sekolah, terutama dengan mengaitkannya pada kerangka SDGs Tujuan 16 dan arah kebijakan nasional Asta Cita, masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang perlu dikembangkan, khususnya dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip MBS diimplementasikan sebagai mekanisme penguatan tata kelola pendidikan yang baik pada tingkat satuan pendidikan.

SD Negeri 72 Banda Aceh dipilih sebagai lokasi penelitian karena telah menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan serta melibatkan komite sekolah dan masyarakat dalam berbagai program sekolah. Namun demikian, efektivitas implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola sekolah tersebut masih perlu dikaji secara lebih mendalam melalui bukti empiris. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik pelaksanaan MBS, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya, serta menjelaskan kontribusinya terhadap penguatan tata kelola sekolah yang efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Manajemen Berbasis Sekolah sebagai instrumen penguatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pendidikan di SD Negeri 72 Banda Aceh. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi dan manajemen pendidikan, sekaligus menjadi masukan bagi sekolah, pemerintah daerah, dan pemangku kebijakan dalam memperkuat implementasi MBS sebagai strategi peningkatan kualitas tata kelola pendidikan.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam penerapan MBS di SD Negeri 72 Banda Aceh. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih luas tentang praktik, tantangan, dan dampak penerapan MBS dari perspektif guru sebagai pelaku langsung di lapangan.

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah Ibu Irma, salah satu guru di SD Negeri 72 Banda Aceh, yang memiliki pengalaman langsung dalam penerapan MBS di sekolahnya. Beliau dipilih karena memahami proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program berbasis MBS.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di SD Negeri 72 Banda Aceh, sebuah sekolah dasar negeri yang menerapkan prinsip partisipatif dalam pengelolaan sekolah. Lokasi ini dipilih karena sekolah tersebut aktif melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan dan pelaporan kegiatan sekolah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan Ibu Irma sebagai informan utama. Pertanyaan meliputi pemahaman tentang MBS, penerapan, transparansi, peran guru, tantangan, serta keterkaitan dengan SDGs dan Asta Cita.

Observasi tidak langsung, melalui pengamatan terhadap dokumen dan laporan sekolah yang menunjukkan bentuk transparansi seperti papan informasi dan laporan BOS. Dokumentasi,

berupa catatan rapat, laporan kegiatan, serta kebijakan sekolah yang mendukung penerapan MBS.

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap:

1. Reduksi data, yaitu menyeleksi dan menyederhanakan data hasil wawancara agar fokus pada topik MBS dan transparansi.
2. Penyajian data, yaitu menyusun data secara sistematis dalam bentuk narasi dan tabel temuan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, untuk menemukan pola, hubungan, serta implikasi penerapan MBS terhadap tata kelola sekolah.
4. Validitas Data

Keabsahan data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil wawancara dikonfirmasi dengan dokumen sekolah dan hasil observasi, sehingga informasi yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Menurut Ibu Irma, Manajemen Berbasis Sekolah adalah sistem pengelolaan yang memberi kewenangan kepada sekolah untuk merancang dan melaksanakan programnya sendiri sesuai kebutuhan, dengan melibatkan kepala sekolah, guru, komite, dan orang tua siswa.

1. Penerapan MBS di SD Negeri 72 Banda Aceh

Sekolah melaksanakan MBS melalui perencanaan bersama antara guru, kepala sekolah, dan komite untuk menentukan program tahunan, pengelolaan dana BOS, serta pembagian tugas secara partisipatif. Setiap keputusan diambil berdasarkan musyawarah agar tercipta rasa tanggung jawab bersama.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan di papan pengumuman, rapat bersama komite sekolah, serta pelibatan guru dalam evaluasi program. Sekolah juga menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan yang disampaikan kepada orang tua dan masyarakat.

3. Peran Guru dalam Penerapan MBS

Guru berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, memantau kegiatan, serta menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini menjadikan guru tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga pengawas internal.

4. Tantangan yang Dihadapi

Beberapa tantangan yang muncul meliputi kurangnya pemahaman sebagian pihak terhadap pentingnya transparansi serta keterbatasan kemampuan dalam menyusun laporan administrasi yang rapi dan sistematis.

5. Dukungan terhadap SDGs dan Asta Cita

MBS mendorong terciptanya tata kelola sekolah yang transparan, demokratis, dan berintegritas. Hal ini selaras dengan tujuan SDGs 16 dan Asta Cita 7 yang menekankan pentingnya lembaga publik yang efektif dan dapat dipercaya.

6. Praktik Terbaik di Sekolah

SD Negeri 72 Banda Aceh secara rutin mengadakan rapat terbuka, mempublikasikan laporan kegiatan, dan melibatkan komite sekolah dalam pengawasan penggunaan dana. Praktik ini memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan akuntabilitas.

2. Pembahasan

Kerangka Teoritis dan Konseptual

Secara teoritis, MBS berakar pada teori desentralisasi dan manajemen partisipatif. Caldwell & Spinks (1992) dalam model "The Self-Managing School" menekankan bahwa sekolah yang mengelola sumber dayanya sendiri akan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan lebih inovatif. Namun, teori principal-agent mengingatkan bahwa pemberian otonomi (delegasi dari pemerintah/principal kepada sekolah/agent) berisiko menimbulkan asymmetric information dan moral hazard jika tidak dikontrol. Di sinilah mekanisme transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menyelaraskan kepentingan dan mengurangi risiko penyimpangan.

Dalam konteks Indonesia, landasan hukum MBS terutama tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang mengatur pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan prinsip MBS, serta diperkuat oleh Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler. Regulasi ini secara eksplisit mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah.

1. Mekanisme MBS sebagai Penggerak Transparansi dan Akuntabilitas:

Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif (RKS dan RKAS): Proses penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang melibatkan komite sekolah dan perwakilan guru/orang tua memastikan bahwa prioritas pembiayaan adalah kebutuhan riil pembelajaran. Transparansi tercermin dari sosialisasi draft RKS/RKAS, sementara akuntabilitas terwujud dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaannya dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Pengelolaan Keuangan yang Terbuka dan Terakses: Sekolah wajib memajang informasi keuangan (penggunaan dana BOS, sumbangan orang tua) di papan pengumuman sekolah, serta dapat mempublikasikannya melalui website atau media sosial. Praktik ini sesuai dengan prinsip *freedom of information* yang mendukung SDGs 16.10. Sumber daya seperti e-RKAS (aplikasi perencanaan anggaran) dari Kemendikbudristek adalah alat yang dirancang untuk memfasilitasi transparansi ini.

Akuntabilitas Kinerja melalui Pelaporan dan Evaluasi: Kepala sekolah bertanggung jawab tidak hanya secara finansial (*financial accountability*), tetapi juga secara kinerja (*performance accountability*). Laporan kemajuan hasil belajar siswa, capaian program, dan evaluasi diri sekolah (EDS) menjadi bahan pertanggungjawaban kepada komite sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan. Mekanisme ini membangun *mutual accountability* di antara warga sekolah.

Peran Komite Sekolah sebagai Mitra dan Pengawas: Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, lembaga ini berfungsi untuk menampung aspirasi, memberikan pertimbangan, mengawasi pelayanan pendidikan, dan mendukung sumber daya. Komite sekolah yang berkapasitas dapat menjadi *social audit* yang efektif, mencegah praktik *rent-seeking* dan memastikan kebijakan sekolah berpihak pada peserta didik.

2. Analisis Kesesuaian dengan SDGs 16 dan ASTA CITA 7:

SDGs 16 (Target 16.5 & 16.6): MBS berkontribusi langsung pada pengurangan praktik korupsi (16.5) dengan memutus rantai birokrasi yang panjang dan membuka ruang pengawasan publik. Dengan membangun sistem pengelolaan yang terbuka, MBS mengembangkan kelembagaan yang efektif dan akuntabel di tingkat dasar (16.6). Sekolah menjadi miniatur masyarakat yang mempraktikkan tata kelola yang baik.

ASTA CITA 7: MBS adalah implementasi operasional dari cita ini. "Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas" tercapai melalui prosedur penganggaran, pelaporan, dan evaluasi yang sistematis dan terbuka. "Peningkatan Partisipasi Publik" adalah jiwa dari MBS, di mana komite sekolah dan masyarakat bukan lagi pihak pasif, tetapi mitra aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan anak-anak mereka. Dengan kata lain, MBS adalah *policy vehicle* untuk mewujudkan ASTA CITA 7.

1. Tantangan dan Hambatan: Meski regulasi mendukung, implementasi di lapangan menemui kendala:
2. Variasi Kapasitas: Kapasitas manajerial kepala sekolah dan anggota komite sekolah dalam mengelola keuangan dan program sangat beragam, terutama di daerah terpencil.
3. Partisipasi Semu: Partisipasi masyarakat terkadang hanya bersifat formalitas (*rubber-stamping*) tanpa keterlibatan substantif dalam pengambilan keputusan.
4. Budaya dan Resistensi: Budaya paternalistik dan birokratis yang kuat di beberapa daerah membuat transparansi dianggap sebagai ancaman daripada keharusan.
5. Beban Administratif: Tuntutan pelaporan yang kompleks dapat membuat sekolah fokus pada kepatuhan administratif (*accounting*) daripada akuntabilitas substansial (*accountability*).

D. Kesimpulan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terbukti memiliki relevansi yang mendalam dan multi-dimensi. Lebih dari sekadar model administrasi pendidikan, MBS adalah sebuah pendekatan tata

kelola (governance approach) yang menempatkan sekolah sebagai unit yang otonom namun terbuka, mandiri namun bertanggung jawab. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi MBS yang holistik dan konsisten yang menekankan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas kinerja kepada publik secara langsung membangun institusi pendidikan yang lebih kuat, kredibel, dan responsif.

Dengan demikian, MBS berfungsi sebagai jembatan strategis dan katalis yang menghubungkan praktik di tingkat akar rumput (sekolah) dengan agenda pembangunan yang lebih luas. Di satu sisi, MBS adalah alat yang paling konkret untuk mewujudkan ASTA CITA 7 Kemendikbudristek. Di sisi lain, melalui pembentukan ekosistem sekolah yang terbuka dan akuntabel, MBS memberikan kontribusi nyata dan terukur terhadap pencapaian SDGs 16, khususnya dalam membangun institusi yang efektif dan mengurangi korupsi.

Kunci keberhasilan terletak pada komitmen semua pihak untuk bergerak melampaui formalitas menuju substansi. Penguatan kapasitas bagi kepala sekolah dan komite sekolah.

penyederhanaan sistem yang berorientasi pada hasil, dan pendampingan berkelanjutan mutlak diperlukan. Pada akhirnya, membudayakan transparansi dan akuntabilitas di sekolah berarti tidak hanya memajukan pendidikan, tetapi juga mendidik generasi penerus untuk hidup dalam masyarakat yang demokratis, adil, dan berintegritas. Inilah sumbangsih besar pendidikan bagi pembangunan berkelanjutan. penyederhanaan sistem yang berorientasi pada hasil, dan pendampingan berkelanjutan mutlak diperlukan. Pada akhirnya, membudayakan transparansi dan akuntabilitas di sekolah berarti tidak hanya memajukan pendidikan, tetapi juga mendidik generasi penerus untuk hidup dalam masyarakat yang demokratis, adil, dan berintegritas. Inilah sumbangsih besar pendidikan bagi pembangunan berkelanjutan.

E. Referensi

- Caldwell, B. J., & Spinks, J. M. (1992). *Leading the Self-Managing School*. London: The Falmer Press. (Sumber teori dasar MBS)
- Kemendikbudristek. (2020). *Asta Cita Pendidikan*. Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (Dokumen kebijakan nasional yang menjadi rujukan)
- Kemendikbudristek. (2021). *Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler*. Jakarta. (Regulasi operasional MBS dan pengelolaan keuangan sekolah)
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Panduan Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta. (Dokumen resmi pemahaman SDGs di Indonesia, termasuk Goal 16)
- Miles, M. B., & Ekholm, M. (1991). "Will School-Based Management Lead to Greater School Effectiveness?" *International Journal of Educational Management*. (Diskusi kritis tentang hubungan MBS dan efektivitas sekolah)
- Mulyasa, E. (2022). *Manajemen Berbasis Sekolah dalam Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurkolis. (2016). *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. (Landasan hukum peran serta masyarakat)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. (Landasan hukum desentralisasi pengelolaan dana pendidikan)
- Rohiat. (2011). *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Sagala, S. (2017). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Resolution adopted by the General Assembly. (Dokumen resmi Penerbitan SDGs, termasuk Goal 16)
- Usman, H. (2016). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- World Bank. (2007). *What is School-Based Management?* Washington, D.C.: The World Bank. (Laporan yang menjelaskan berbagai model dan prinsip MBS secara glob)